



Buletin Parlementaria

Nomor 1180/II/XII/2021 • Desember 2021

DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022



**3 Semeru Meletus,
Puan Maharani:
Utamakan
Penyelamatan Warga**



**5 Gus Muhaimin Ajak
Masyarakat Gotong
Royong Ringankan
Beban Korban Semeru**



9 772614 339005



BULETIN

DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima pandangan pemerintah atas RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dari Menkumham Yasonna Laoly pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/nvl

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12).

“Setelah mendengarkan dengan seksama laporan Ketua Badan Legislasi, maka kami selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan pada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Ketua Badan Legislasi mengenai penetapan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dapat disetujui?” tanya Dasco yang dijawab ‘setuju’ oleh seluruh Anggota DPR RI yang hadir secara fisik dan virtual, dan diikuti ketukan palu sidang tanda persetujuan.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam saat menyampaikan laporan Baleg atas Penyusunan dan Pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 dalam Rapat Paripurna, mengatakan bahwa Baleg DPR RI, Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang telah menyepakati hasil penyusunan dan pembahasan



**ADA PENAMBAHAN
9 RUU DALAM
PROLEGNAS TAHUN
2020-2024**

RUU Prolegnas Prioritas tahun 2022 dan evaluasi Prolegnas RUU Tahun 2020-2024.

Keputusan tersebut di antaranya, RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 RUU dengan rincian; 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan pemerintah dan 2 RUU diusulkan DPD RI serta menetapkan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU.

“Hal ini dikarenakan adanya penarikan dua RUU usulan Pemerintah dari Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa karena materi muatan kedua RUU telah diakomodir dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Peraturan Perpajakan,” papar Ibnu.

Selain itu, politisi PKB tersebut menambahkan, ada penambahan 9 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu; empat RUU usulan DPR antara lain RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI, RUU tentang Wisata Khusus dan RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Dua RUU usulan Pemerintah yaitu RUU tentang Pelelangan dan RUU tentang Penilai yang semula materinya digabung dalam RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara serta tiga RUU usulan DPR RI yaitu RUU Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara dan RUU tentang Pemerintahan Digital. ■ bia/sf

Semeru Meletus, Puan Maharani: Utamakan Penyelamatan Warga

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan rasa prihatin atas bencana meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (4/12) sore. Ia pun meminta agar pemerintah bersama instansi terkait memprioritaskan penyelamatan warga.

“Keprihatinan mendalam kami haturkan kepada warga Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lumajang, yang tengah diterpa bencana gunung meletus. Kita berharap semoga tidak ada korban jiwa akibat meletusnya Gunung Semeru,” kata Puan, Sabtu (4/12). Puan meminta agar pemerintah segera melakukan tanggap darurat.

Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan koordinasi dengan BPBD, TNI/Polri dan berbagai lembaga/instansi lainnya. “Utamakan penyelamatan warga terdampak gunung meletus, terutama untuk warga di sekitar Gunung Semeru yang terjebak di sekitar rumahnya dan belum berhasil menyelamatkan diri,” tegas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Warga Desa Curah Kobokan, Lumajang, yang berada di lereng Gunung Semeru dilaporkan tengah membutuhkan bantuan. Warga yang



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Geraldini/nvl

tak sempat keluar dari desa saat erupsi terjadi kini berlindung di masjid dan membutuhkan evakuasi karena posisinya terjebak lava. “Kerahkan potensi-potensi tim SAR terdekat untuk membantu evakuasi warga. Hal ini harus menjadi prioritas mengingat warga yang tinggal di sekitar lereng Semeru tak membawa apa-apa saat berusaha menyelamatkan diri,” ucap Puan.

Erupsi Gunung Semeru juga membuat dua kecamatan di Lumajang dalam kondisi gelap gulita. Puan mengingatkan Pemda untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. “Logistik hingga perlengkapan medis harus tersedia untuk warga korban letusan Semeru. Pemda pun perlu menyiapkan pengungsian yang nyaman bagi warga, khususnya untuk balita, anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui,” tutur legislator dapil Jateng V itu. ■ pun/sf



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos., Ridwan Budiman, S.I.P., Agung Hidayat, S.I.P., Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldii Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahhaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ilsandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

DPR Setujui RUU Kejaksaan Menjadi UU

Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) menjadi Undang-Undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12). Jawaban ‘Setuju’ pun serentak dilontarkan, diikuti ketukan palu sidang tanda persetujuan.

Sebelumnya dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kejaksaan Adies Kadir, persetujuan ini merupakan kesepakatan seluruh fraksi yang menerima hasil kerja Panja yang disampaikan dalam Rapat Kerja bersama pemerintah pada 6 Desember 2021. “Sehingga, RUU tersebut dapat segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, untuk dilanjutkan kepada tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Undang-Undang,” jelas Adies.

Adies menambahkan, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/14241/DPR RI/X/2021, Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk

membahas RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan RI tersebut bersama dengan Pemerintah. Komisi III DPR RI lalu menindaklanjuti penugasan ini dengan menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 15 November 2021 dengan agenda pembentukan Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI. Serta dilakukan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang 2 Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI dari pemerintah.

Selanjutnya, Adies menambahkan, Panja RUU tentang Kejaksaan RI ini terdiri dari 33 orang dari Anggota Komisi III DPR RI yang bertugas untuk

membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi dan DIM RUU tentang Kejaksaan RI Panitia Kerja melakukan pembahasan pada tanggal 22-24 November 2021 bersama dengan Tim Panja Pemerintah.

“Panja selanjutnya membentuk Tim Khusus/Tim Sinkronisasi untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja, yang telah melaksanakan tugasnya pada tanggal 2 Desember 2021,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2021, hasil kerja selama pembahasan di Timus/Timsin telah dilaporkan pada Pleno Panitia Kerja, dan telah disetujui oleh Panja. Beberapa substansi pembahasan yang mengemuka dalam RUU ini di antaranya adalah terkait usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan hormat, penegasan lembaga pendidikan khusus kejaksaan, perlindungan jaksa dan keluarganya, hingga kedudukan Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara dan Kuasa Hukum penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). ■ rdn/sf



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan RUU Kejaksaan Republik Indonesia dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/nvl

DPR Setujui RUU HKPD Menjadi UU



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyerahkan laporan pembahasan RUU HKPD kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/mv

Rapat Paripurna DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sebagian besar fraksi menerima dan menyetujui pengesahan RUU yang akan mengatur mulai dari ketentuan anggaran daerah hingga ketentuan pajak dan retribusi daerah.

“Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU HKPD dapat disetujui menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12). Pertanyaan itu

pun dijawab ‘setuju’ oleh sejumlah Anggota DPR yang hadir dalam rapat itu, diikuti ketukan palu persetujuan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyampaikan laporan terkait rapat kerja (raker) Komisi XI bersama pemerintah, dimana delapan Fraksi yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN dan PKB menerima hasil pembahasan RUU. Sedangkan Fraksi PKS menolak pembahasan RUU HKPD dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembahasan di Rapat Paripurna.

Adapun kata Fathan, sistematika RUU HKPD terdiri dari 12 BAB dan 193 pasal. Ia mengharapkan beleid baru itu akan dapat memberikan manfaat dalam mendorong pengalokasian sumber

daya nasional yang efektif dan efisien. “Sehingga nantinya dapat mewujudkan hubungan keuangan pusat daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan demi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan nasional,” kata politisi PKB itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan regulasi yang disahkan tersebut didesain sebagai upaya reformasi menyeluruh. Tidak hanya dari sisi *fiscal resource allocation*, melainkan juga memperkuat sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat. Hal itu, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. ■ ah/sf

Gus Muhaimin Ajak Masyarakat Gotong Royong Ringankan Beban Korban Semeru

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta BNPB agar bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur serta pihak-pihak yang lokasinya berdekatan dengan wilayah bencana, untuk sigap dalam menangani bencana letusan Gunung Semeru. Ia juga meminta agar seluruh keperluan para korban baik itu sembako maupun obat-obatan juga didiapkan di tempat

pengungsian sementara.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong-royong bersama-sama meringankan beban korban. Seberapapun partisipasi kita akan sangat berarti bagi para korban bencana,” pesan Gus Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12).

Tak hanya itu, politisi PKB ini juga mengintruksikan kepada kader dan pengurus partainya, serta para Anggota DPR RI baik yang ada di Lumajang dan sekitaran Jawa Timur untuk turun langsung membantu para korban bencana. Banyak masyarakat yang membutuhkan

bantuan karena rumahnya rusak, ada juga korban luka bakar, dan lain sebagainya.

“Politik kehadiran, politik kemanusiaan ini sangat penting sebagai wujud adanya partai politik. Ini menjadi kewajiban kita semua sebagai representasi rakyat di bawah,” ujar Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Gus Muhaimin juga turut mendoakan negeri ini agar tidak lagi ada letusan susulan, dan para korban yang mengalami luka-luka segera diberi kesembuhan. “Ya Allah, selamatkan dan lindungilah seluruh saudara-saudaraku yang menjadi korban letusan Gunung Semeru,” ucapnya dalam doa.

Diketahui, Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu (4/12) sore sekitar pukul 15.20 WIB. Erupsi tersebut diawali getaran banjir lahar atau guguran awan panas. Situasi di sekitar titik lokasi, di Lumajang, langsung berubah gelap akibat kabut abu vulkanik. Getaran banjir lahar atau gugurn awan panas tercatat mulai pukul 14.47 WIB dengan *amplitude* maksimal 20 milimeter.

Berdasarkan data dari Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB Abdul Muhari, setidaknya hingga Minggu pagi telah terdapat 13 orang meninggal akibat erupsi gunung yang ada di Lumajang, Jawa Timur tersebut. Dari 13 korban jiwa, baru dua jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Poniem usia 50 tahun dari Curah Kobokan, Desa Sapiturang, serta Pawon Riyono. ■ rdn/es

Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Jaka/nvl



Komisi II Awasi Masalah Pertanahan Lampung

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan Panja Pengukuran Ulang Hak Pengelolaan (HPL), Hak Guna Usaha (HGU) dan HAK Guna Bangunan (HGB) di Kalimantan Timur dan Riau ditemukan informasi-informasi baru, seperti tidak optimalnya penggunaan HGU hingga penyalahgunaan penggunaan HGU.

“Masih ada masalah-masalah sengketa antara tanah rakyat dengan perusahaan, kemudian HGU yang tumpang tindih dengan kepentingan atau lahan yang lain dan tentu ini yang harus segera kita selesaikan. Kedatangan kami hari ini tentu untuk mendapatkan informasi yang nanti akan kita bahas dan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat di DPR,” ungkap Doli saat memimpin pertemuan Panja Komisi II DPR RI dengan Gubernur

Lampung beserta jajaran di Bandar Lampung, Lampung, Senin (6/12).

Lebih lanjut dalam pertemuan di Kantor Gubernur Lampung ini, Doli menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam pengumpulan data dan informasi terkait HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal. “Sekarang ini kita masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi nanti sewaktu-waktu setelah datanya lengkap tentunya kita akan mengambil langkah-langkah, salah satunya kita akan menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab seperti ATR/BPN, KLHK maupun aparat penegak hukum,” ungkapnya.

“Kita berharap HPL, HGU dan HGB itu bisa optimal mencapai untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Misalnya kalau ada kasus-kasus selama ini, ada pihak ketiga yang diberikan HGU namun setelah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan dan itu tidak menghasilkan benefit untuk bangsa dan

negara, bahkan menyusahkan rakyat. Itu yang tidak kita inginkan. Dengan adanya panja ini, kita bisa melihat masalah dan kemudian menyelesaikan. Sejangkalah pun itu harus memberikan manfaat untuk rakyat bangsa dan negara,” jelas Doli.

“Hari ini kita berkunjung ke Provinsi Lampung, dan alhamdulillah bisa mencari jalan keluar dari permasalahan seperti daerah yang dikunjungi sebelumnya. Misalnya di Lampung, ada satu perusahaan yang dalam pengoptimalan produksi komoditi yang menjadi andalan di Lampung ini, dengan keterbatasan lahan ternyata ditemukan pola baru yang bisa dikerjakan samakan dengan petani yaitu menggunakan lahan petani dan perusahaan itu melakukan pembinaan, mulai dari penyediaan bibit dan lain-lain dan ini menambah produktifitas dari komoditi itu,” terang Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut. ■ skr/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bertukar cenderamata dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto: Singgih/nvl

Komisi V Dukung Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi

Komisi V DPR RI mendukung pembangunan jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi sebagai prasarana penunjang mobilitas angkutan penumpang dan barang. Untuk diketahui Proyek pembangunan jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total panjang 57 km.

“Menurut kami proyek ini sangat strategis karena meningkatkan kualitas pelayanan, kapasitas lintas, meminimalisir biaya angkut barang dan distribusi logistik, mengurangi kepadatan lalu lintas dan jalan raya. Untuk itu kami memberikan suatu



Komisi V DPR RI meninjau jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi. Foto: Tiara/nvl

dorongan untuk proyek ini bisa terlaksana dengan baik,” urai kata Wakil

Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw usai memimpin kunjungan kerja spesifik



Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Nadia/nvl

Wujudkan Zero ODOL, DPR Nilai UPPKB Perlu Dievaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menuturkan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum terlalu efektif. Karena posisi jembatan timbang yang

memang berada di ruas jalan Nasional tidak dapat menjangkau kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melalui jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, sehingga akhirnya jalan-jalan tersebut lebih mudah rusak.

Saat mengikuti Kunspek Komisi V DPR RI ke UPPKB Kabupaten Serang, Banten, Kamis (2/12), ia juga juga menyoroti sumber daya manusia serta teknologi yang ada di UPPKB. Ke depan, ia meminta harus ada evaluasi dan dibuatkan formula yang tepat terkait keberadaan jembatan timbang.

“Memang problemnya mulai dari SDM di unit sebesar ini hanya ada satu pegawai yang berstatus PNS selebihnya itu pegawai kontrak. Di sisi lain, tidak boleh ada pembatasan orang untuk memanfaatkan jalan tapi harus dicari formula yang tepat

Komisi V DPR ke Stasiun Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/12).

Kepadatan lalu lintas hingga menimbulkan kemacetan di sekitar Stasiun Batutulis, menjadi salah satu hal yang disoroti Politisi Partai NasDem itu. Menurutnya, secara teknis persoalan tersebut harus segera diselesaikan. Karena pada prinsipnya Komisi V DPR RI mendorong perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan sebagai indikator utama dalam mempersiapkan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memadai sehingga masyarakat dapat menggunakan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman.

"Kami lihat di depan Stasiun Batutulis, yang merupakan salah satu bangunan *heritage* karena dibangun sejak tahun 1881 ini begitu *crowded* dan macet. Maka menurut kami Dirjen Perkeretaapian perlu untuk melakukan desain ulang, agar jalan ini bisa dipindahkan, sehingga di depan stasiun ini menjadi satu daerah yang betul-betul *clear* tidak menimbulkan kemacetan, dan aman untuk dilintasi," jelas legislator dapil Papua itu. ■ tra/es

agar jalan ini bisa di manfaatkan semaksimal mungkin mampu menahan beban yang besar dengan ukuran yang juga besar tapi juga tidak merusak jalan. Saya kira ini akan kami evaluasi dalam UU LLAJ," paparnya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menilai kondisi pelayanan UPPKB Cikande ini justru sangat memprihatinkan. Menurutnya, ini adalah cerminan dari jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia. "Karena tentu harus dibarengi dengan kemampuan personal dan peralatan yang memadai. Kalau petugas lapangan saja sangat terbatas, bagaimana caranya bisa memantau dengan sekian ratus ribu kendaraan yang harus mereka awasi," kata politisi Partai PPP itu. ■ ndy/es

Komisi V Apresiasi Hasil Uji BPLJSKB Telah Berskala Internasional



Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan jajaran BPLJSKB di Cibitung, Jawa Barat. Foto: Chasbi/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi keberadaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) terkait dengan hasil uji rekomendasinya telah berskala internasional. Untuk itu, politisi Partai Gerindra tersebut menilai balai yang berdiri di tanah seluas 90 hektare tersebut tentunya harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan Komisi V DPR RI.

"Kami pun bangga, karena balai laik jalan ini telah diterima rekomendasinya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah. Hasil sertifikasi ini sudah dapat diekspor keluar negeri jadi apa yang menjadi pengujian di balai laik jalan ini dapat dipergunakan di beberapa negara-negara tersebut," kata Andi Iwan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan jajaran

di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/12).

Perlu diketahui, setiap tipe mobil harus dilakukan uji tipe dan dinyatakan lulus sebelum dapat dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Adapun tahapan pengujian tipe yang dilakukan di BPLJSKB meliputi pemeriksaan konstruksi, pengukuran dimensi, uji lampu utama, uji kincup roda, uji radius putar, pengukuran berat, uji rem, uji fungsi speedometer, uji klakson hingga uji emisi gas buang.

"Pada dasarnya yang menjadi prioritas utama untuk laik jalan adalah bagaimana tentang *safety* pada pengguna kendaraan sehingga dibutuhkan hasil sertifikasi yang memadai. Hasil sertifikasi dari balai ini sudah dapat diekspor, (dan) hasil uji tersebut bisa dipergunakan di beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah. Tentunya balai ini harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan Komisi V DPR untuk upaya pengembangan balai ke depannya," tutup legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. ■ cas/sf

BUMN Diharap Mampu Berkontribusi dalam Pemilihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dan meluas, baik dari sisi kesehatan, maupun sektor ekonomi. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *agent of development* beserta seluruh anak perusahaannya menjadi sangat vital.

“Diharapkan seluruh BUMN mampu menjadi motor penggerak serta berkontribusi secara aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ungkap Martin saat memimpin Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI mengunjungi PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/12).

Martin menambahkan, PT KIW merupakan salah satu dari 18 BUMN yang akan dilakukan revitalisasi, dimana perusahaan tersebut masih dinyatakan sehat, namun skala usahanya kurang signifikan. Kementerian BUMN sendiri, telah memberikan amanat kepada PT Danareksa untuk mengelola BUMN *scale up*. Selaku aset kelolaan, perusahaan *scale up* dimaksud akan dikelola dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Panja Komisi VI DPR RI telah mendengar secara langsung kondisi aktual, permasalahan serta tantangan yang dihadapi PT KIW. “Termasuk adanya rencana revitalisasi (*scale up*) perusahaan, serta langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung bertukar cenderamata dengan direksi PT KIW. Foto: Bianca/nvl

meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Martin menilai, secara keseluruhan, kinerja dari PT KIW cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian keuntungan yang masih bisa

diperoleh PT KIW meski di tengah dampak pandemi. “Dari paparan yang ada kami melihat bahwa walaupun ada dampak pandemi tapi masih bisa membukukan keuntungan,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II ini. ■ bia/sf

DPR Dorong Kawasan Industri SIER Kembangkan Bisnis Masa Depan

Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo berharap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) agar tetap berupaya mengembangkan usahanya baik dari sisi *core* maupun *non-core*

bisnisnya. Perusahaan kawasan industri milik negara tersebut harus membaca potensi di masa depan sehingga dapat menjadikannya kesempatan untuk terus berkembang.

Berdasarkan penilaian Eko, SIER memiliki yang memiliki beragam

Komisi VI: PT Barata Harus Lakukan Transformasi Teknologi

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menilai PT Barata Indonesia (Persero) tidak cukup hanya melakukan restrukturisasi perusahaan, melainkan harus transformasi agar lebih lincah (*agile*) dengan teknologi. Sebab, menurut Sondang, saat ini era di mana digitalisasi teknologi sudah berkembang. Namun, perusahaan pelat merah ini diketahui masih sering beroperasi dengan cara manual hingga kini.

“Sekarang kan teknologi sudah berkembang, itu kenapa tidak dibikin otomatis. Tidak dibikin PLC (programmable logic controller), apalagi sekarang sudah era digitalisasi,” jelas Sondang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Barata Indonesia, di Gresik, Jawa Timur, Senin (29/11).

Saat ini, BUMN Manufaktur tersebut baru saja mendapatkan putusan *voting* PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya. Dampak dari putusan tersebut, PT Barata harus melakukan restrukturisasi manajemen, termasuk pengelolaan

aset, dalam pembinaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Dengan adanya transformasi kelembagaan dan sumber daya manusia ini, Sondang berharap PT Barata dapat menjadi industri strategis yang benar-benar unggul, khususnya dalam memproduksi manufaktur perkeretaapian.

“Kami bangga melihat bahwa ada produksi untuk kereta api, di mana hanya tiga negara yang bisa, yaitu China, India, dan Indonesia. Kenapa kita tidak dikembangkan jadi industri strategis ini sehingga Indonesia benar-benar unggul di sana?” harap politisi PDI-Perjuangan itu lebih lanjut. ■ rdn/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Barata Indonesia. Foto: Ridwan/nvl



Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo.
Foto: Agung/nvl

kemitraan bisnis seharusnya dapat mengulik nilai tambah (*added value*) seperti apa lagi yang dapat dikembangkan perusahaan. Apalagi kawasan SIER merupakan wilayah strategis yang aksesnya berdekatan dengan pelabuhan dan lokasi industri lainnya.

“Saya juga lihat *frame work* Provinsi Jawa Timur ini ada Surabaya Railway yang mengkoneksikan berbagai wilayah sekitar Surabaya, ini apakah sudah dipikirkan dampak nilai tambahnya bagi perusahaan,” terangnya saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi VI DPR RI dengan manajemen PT SIER di Surabaya, Jatim, Senin (29/11).

Adanya potensi kemacetan lalu lintas menuju pelabuhan barang di Tanjung Perak karena banyaknya pengguna kawasan industri SIER yang bertindak sebagai *warehouse*, maka manajemen harus mengantisipasi hal tersebut. Selain itu SIER juga dapat mendorong pengembangan *non-core* bisnis seperti sektor hunian ataupun pariwisata. Sebab bercermin dari beberapa kawasan industri di tingkat nasional juga telah merambah sektor tersebut dan tergolong sukses. ■ ah/sf

Komisi VII Tekankan Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PLTS Vena Energy di Likupang, Minahasa Utara. Foto: Saum/nvl

Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang handal dan mandiri (clean and renewable energy). Hal ini jadi penting agar seluruh wilayah Indonesia secara mandiri memiliki akses sumber energi yang dihasilkan berdasarkan potensi energi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT Vena Energy di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (4/12). Peninjauan PLTS dilakukan bertujuan untuk menemukan sekaligus belajar

dari *best practices* guna mendorong terciptanya energi alternatif di Indonesia.

“Kunjungan ini bertujuan untuk menemukan dan mempelajari dari *best practices* di lapangan. Komisi VII DPR sangat *concern* dengan *clean and renewable energy*. Saat ini kita tahu kita sedang ke arah sana,” terang Sugeng.

Komitmen menghasilkan EBT bukan sekadar omongan belaka. Dirinya menjelaskan Indonesia turut terlibat dan menandatangani Paris Agreement. Kemudian, perjanjian tersebut ditegaskan dengan ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.

Tentu, ia menegaskan, serangkaian kebijakan ini menjadi bukti komitmen Indonesia untuk memperoleh energi bersih, handal, dan mandiri tanpa

tergantung sumber fosil. “Kita semua akan menekan serendah mungkin emisi karbon. Energi baru dan terbarukan bukan pilihan, itu keharusan,” tegas Sugeng terkait pemanfaatan EBT.

Walaupun pengembangan PLTS masih perlu menghadapi tantangan seperti terbatasnya lahan untuk membangun infrastruktur PLTS, politisi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu tetap optimis hal tersebut bisa dihadapi dengan menerapkan sistem *floating*. Sehingga, infrastruktur tenaga surya bisa memanfaatkan danau atau laut untuk menyerap energi surya.

“Tidak ada alasan. Indonesia harus memiliki energi baru terbarukan yang bersih tentu dan bisa diakses oleh rakyat. Apalagi di tengah komitmen dunia dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon,” tandas legislator dari Jawa Tengah VIII tersebut. ■ ts/sf

Eddy Soeparno Nilai Prospek Industri PT CAP Sangat Baik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia memiliki PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) yang mampu menyediakan bahan baku untuk pembuatan plastik dan keperluan industri lainnya. Ia juga menilai, prospek industri yang dijalankan oleh PT CAP kedepan akan sangat baik.

Hal tersebut disampaikan Eddy usai pertemuan dengan jajaran direksi PT CAP, yang juga dihadiri oleh Wali Kota

Cilegon beserta jajaran di PT CAP, Cilegon, Banten, Senin (6/12). “Memang tidak terasa sudah 29 tahun PT CAP beroperasi dan saya kira ini merupakan sebuah industri yang memiliki prospek yang baik. Apalagi mereka sudah mencanangkan akan membangun CAP yang kedua,” tuturnya.

Kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan rencana PT CAP, sambung Eddy, akan terlihat perluasan pabrik dengan penambahan kemampuan dalam memproduksi bahan-bahan petrokimia yang

dibutuhkan untuk industri lebih lanjut. Sehingga PT CAP akan berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan impor yang selama ini sangat signifikan.

Namun, yang perlu diperhatikan menurut Eddy adalah perlunya substitusi impor. “Jadi, sampai sekarang ini bahan bakunya masih impor. Yang sedianya bisa dilakukan di dalam negeri dengan berdirinya dan beroperasinya *refinery* di Indonesia. Saya kira nanti akan ada pengganti dari bahan baku yang selama ini diimpor untuk bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh PT CAP,” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, sebagaimana telah diusulkan oleh PT CAP, yaitu terkait berbagai insentif yang memang ingin berkembang lebih lanjut. “Seperti insentif fiskal, insentif dari aspek ketergantungan pada substitusi bahan baku, dan lain-lain. Dan itu perlu kita kembangkan lebih lanjut lagi,” tandas Eddy lebih lanjut. ■ es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat pertemuan dengan jajaran direksi PT CAP di Cilegon. Foto: Erman/mvl

Komisi IX Tegaskan Pentingnya UHC pada Pemda



Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana. Foto: Tasya/rvl

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan bahwa *universal health coverage* (UHC) sangat penting untuk dicapai oleh pemerintah daerah. Sebab, di tengah kondisi data kepesertaan yang kerap berubah

atau bermasalah, menurutnya, kehadiran UHC memberikan jaminan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan berkualitas.

“Jadi ini *urgent* kalau menurut saya supaya kita tidak mengalami gejolak

perubahan data kepesertaan,” tegas Meli, sapaan akrabnya, usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim beserta jajarannya, serta perwakilan Kementerian Kesehatan, BKKBN RI, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program percepatan penanganan *stunting* di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11).

Legislator dapil Sumatera Selatan II ini mengatakan bila suatu daerah sudah termasuk UHC maka, warganya cukup membawa kartu identitas, seperti KTP, untuk mendaftar pelayanan kesehatan. Namun, untuk mencapai UHC, Meli menjelaskan pemerintah daerah harus mendaftarkan 95 persen penduduknya di BPJS Kesehatan. Pihaknya pun meminta agar pemda berperan aktif mendata dan melaporkannya, sebab Kementerian Sosial hanya menetapkan data penerima bantuan iuran (PBI) yang dilaporkan oleh pemda.

“Penduduknya cukup membawa KTP saja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak akan ditanya mana bpjsnya? Mana ininya mana itunya. Mau data begini mau data begitu, ketika kepesertaan sudah mencapai 95 persen, mereka bebas menggunakan KTP untuk berobat,” ujar Anggota F-Gerindra DPR RI ini. ■ nap/sf

Nurhayati Apresiasi Program Pendampingan Calon Pasutri di Kota Tangerang untuk Atasi *Stunting*

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi program pendampingan calon pasangan suami istri (pasutri) yang dilakukan Pemerintah Kota

Tangerang. Menurutnya, itu adalah langkah preventif yang berpeluang berhasil dalam mengatasi *stunting* di Kota Tangerang. Berdasarkan data elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat di Kota

Tangerang pada tahun 2020, angka *stunting* pada balita di Kota Tangerang, tercatat di angka 9,65 persen.

Angka tersebut berada di bawah ambang batas untuk *stunting* versi World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen. “Pasutri yang akan menikah diberikan pelatihan atau pengetahuan mengenai gizi, mengenai mengandung, melahirkan itu saya apresiasi,” terang Nurhayati di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, Selasa (30/11).

Dalam kesempatan yang

Komisi IX Berharap Adanya Kolaborasi Institusi Pendidikan Cegah *Stunting*

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani berharap institusi pendidikan di libatkan melalui skema kolaboratif dalam langkah awal program percepatan penurunan *stunting*. Ia juga mengungkapkan pentingnya memberikan materi pembelajaran maupun pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada para pelajar untuk mencegah terjadinya *stunting* ketika mereka sudah berkeluarga.

“Kita berharap *stunting* yang sudah menjadi program prioritas nasional ini bisa dilakukan dengan pendekatan skema kolaboratif, jadi tidak hanya melakukan intervensi di titik hilir, tetapi juga melakukan upaya promotif di titik hulu, yaitu melibatkan institusi pendidikan sekolah-sekolah. Hal itu tentu saja akan membangun pengetahuan dikalangan remaja dan pelajar tentang bagaimana perilaku

hidup bersih dan sehat sehingga ini bisa menurunkan risiko *stunting* saat mereka berkeluarga dan memiliki keturunan,” tuturnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/11).

Selanjutnya, Netty turut menambahkan dalam mengatasi *stunting* sendiri tidak bisa hanya menggunakan cara yang biasa tetapi harus ada cara *extraordinary* dengan mengkombinasikan kemajuan teknologi. Hadirnya berbagai program aplikasi dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi seperti Cicilan Sanitasi (Cisani), Gemari Ceria, dan lainnya, tentu dapat memudahkan pekerjaan Dinkes untuk bisa mengakselerasi capaian percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Bekasi.



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani. Foto: Novel/nvl

Dalam kunjungan kerja tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi Kota Bekasi yang mampu menurunkan angka prevalensi *stunting* ke 7,56 persen pada tahun 2021. Walaupun ada 2 aksi dari total 8 aksi integrasi untuk memperkuat efektivitas intervensi penurunan *stunting* yang belum dilaksanakan menurut Dinas Kesehatan yaitu aksi ke-6 (Sistem Manajemen Data) dan aksi ke-7 (Pengukuran dan Publikasi *Stunting*). Dua aksi ini diketahui belum bisa dilaksanakan karena Kota Bekasi masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19. ■ nvl/sf

sama, politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menyoroti intervensi pemerintah Kota Tangerang dalam menangani *stunting*. Ia menilai, paparan yang disampaikan perlu penjelasan lebih mendalam karena kurang dijelaskan mengenai mekanisme dan teknis dalam penanganannya di masyarakat.

Nurhayati melanjutkan, penanganan *stunting* dengan intervensi secara langsung menurutnya akan memberikan dampak yang lebih terasa. Selain itu, menurutnya, *stunting* ini tidak hanya dinilai dari aspek pertumbuhan anak, melainkan juga perkembangannya.

“Apakah perkembangan kognitifnya perkembangan otaknya sesuai tidak dengan umurnya. Jadi itu juga bisa mengukur anak itu sudah cukup gizi atau tidak kita dikarenakan kita ketahui kalau anak tidak sehat anak kurang gizi kurang cerdas kurang bisa,” sambungnya. ■ hal/sf

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati. Foto: Hira/nvl



DPR Dorong Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, perpustakaan dapat berperan bukan hanya sebagai pusat informasi, namun bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Cimahi, menurutnya, pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah didukung oleh para pegiat dan komunitas literasi.

“Cimahi ada di ruang lingkup perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial merupakan sebuah keseharusan dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” kata Dede saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan Komisi X di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (3/12).

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar pemerintah daerah perlu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perpustakaan nasional dalam pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Cimahi.

“Program literasi yang ada di Cimahi sudah baik hanya mereka menyampikan kekurangan anggaran. Perlu ada *support* dari pemerintah pusat, terlebih Cimahi memiliki konsep besar yang ingin menjadikan Cimahi menjadi *smart city*,” ungkap Dede.

Di tempat yang sama, Sekda Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan menyampaikan, Pemkot Cimahi memandang pentingnya perputakaan sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat. Pemkot Cimahi juga mencantumkan urusan perpustakaan dalam Misi I RPJMD tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian, berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul. ■ rmm/es

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Foto: Ria/mvl



Tingkatkan Minat Baca, Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin mengapresiasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ia mendorong sosialisasi perpustakaan ini terus ditingkatkan. Dengan begitu layanan literasi berbasis inklusi sosial dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

“Kita sejalan dengan program dari pemerintah, kita ingin semangat literasi ini dapat meningkat. Namun,

ini memang butuh kerja sama dari semua pihak,” ujar Djohar Arifin usai pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Serang, di Banten, Jumat (3/12).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI juga meninjau perpustakaan Gedung Juang 45 serta melihat pembangunan gedung layanan Perpustakaan Kota Serang.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, perpustakaan harus terus berbenah agar tetap eksis di tengah masyarakat. Karena itu, transformasi

Komisi X Dorong Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Brebes

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong perpustakaan di Kabupaten Brebes bertransformasi menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mengingat, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir

dua tahun ini, secara tidak langsung harus mempercepat akselerasi gerak transformasi perpustakaan.

“Problematika kehidupan yang semakin tidak jelas di masa pandemi bisa diselesaikan oleh mereka dengan literasi. Mudah-mudahan dengan bangkitnya daya baca dan prestasi,



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Arief/nvl

tentu akan mendorong mereka juga untuk mengentaskan kemiskinan dan juga bisa meningkatkan tingkat pendidikan akan menjadi naik,” ucap Fikri usai pertemuan dengan Bupati Brebes beserta jajaran yang turut dihadiri perwakilan Perpustakaan RI, di Brebes, Jawa Tengah, Jumat (3/12).

Politisi PKS ini menjelaskan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Secara eksplisit dalam UU tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

Fikri menyampaikan, pemerintah pusat harus bisa melihat perpustakaan secara proposional dan tidak memandang sebelah mata. Karena ini merupakan investasi, tidak bisa masyarakat hanya menerima bantuan saja tetapi harus dicerdaskan dan harus melekat pengetahuan. “Jendela pengetahuan adalah dengan membaca dan menaikkan literasi, saya kira selanjutnya jika semua tingkat literasi naik Indonesia juga pasti akan naik,” pungkas Fikri. ■ afr/es



Komisi X DPR RI meninjau perpustakaan Gedung Juang 45, di Kota Serang, Banten. Foto: Anne/nvl

layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan mampu mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

Djohar menambahkan, payung hukum pelaksanaan transformasi

perpustakaan berbasis inklusi sosial ada pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara eksplisit menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. ■ ann/es

Anggota DPR Apresiasi Kinerja Perbankan Sumut dalam Peningkatan Perekonomian



Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat Kunspek Komisi XI DPR RI ke Medan. Foto: Hanum/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi kinerja perbankan di Sumatera Utara dalam kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian di Sumatera Utara. Hal ini terbukti dari kinerja bank umum yang berkantor pusat di Provinsi Sumatera Utara (BPD Sumatera Utara dan Bank Mestika Dharma), di mana posisi Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan *year-on-year* (yoy) dan *year-to-date* (ytd) yang positif baik dari sisi aset dan kredit.

“Perbankan di Sumatera Utara (Sumut), Industri keuangan non-bank

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Yohan mendorong Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, untuk melakukan program-program yang mendukung masyarakat agar dapat mengakses permodalan dari perbankan, sehingga bisa mengembangkan UMKM.

“Banyak sekali saya kira kelompok-kelompok masyarakat yang punya usaha, tetapi mereka kesulitan di permodalan. Harapan kita dengan kehadiran Bank Indonesia, OJK, kemudian Bank-Bank Himbara ini bisa membantu masyarakat kita yang sedang berusaha mengembangkan usaha mereka agar mereka bisa mendapatkan modal yang aman,” harap Yohan, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/12).

Komisi XI Dorong BI, OJK dan Himbara Beri Akses Permodalan untuk UMKM di Sulsel



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Makassar. Foto: Aisyah/nvl

termasuk Pasar Modal di Sumut itu kinerjanya relatif bagus dan baik. Ini terlihat dari adanya pertumbuhan-pertumbuhan yang positif,” ungkapnya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, OJK, serta Himbara di Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/12).

Di samping itu, politisi dapil Sumatera Utara II tersebut juga menyinggung perihal sektor tani. Menurutnya, satu pertiga penduduk di Sumut menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun, hasil kontribusi sektor tani dalam perekonomian di Sumut diketahui hanya 21 persen. “Dan dengan hasil 21 persen kontribusi tani dalam perekonomian Sumut ini kan artinya belum terlalu *match*,” ujar Gus Irawan

Melihat hal tersebut, politisi Partai Gerindra itu pun berharap agar ke depannya, perbankan ataupun industri jasa keuangan bank dan non-bank yang ada di Sumut dapat semakin memiliki potensi yang bisa benar-benar berkontribusi bagi perekonomian di Sumut. ■ hnm/es

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kapasitas usaha mereka dengan pembinaan di era digitalisasi. “Kalau pelaku-pelaku usaha tidak dekat dengan (digitalisasi) itu, saya kira nanti mereka juga kesulitan. Begitu juga mereka perlu diarahkan bagaimana produk-produk mereka ini sampai ke pasar dengan tepat sehingga ini bisa membantu mereka,” ujar Yohan.

Selain itu, jelas legislator dapil Nusa Tenggara Timur I tersebut, banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, tetapi tidak memiliki informasi yang cukup, sehingga mereka berspekulasi bahwa bank menakutkan. Sehingga, banyak masyarakat yang datang ke rentenir dengan iming-iming pengurusannya mudah dan cepat. ■ ais/sf

Program Pemulihan Ekonomi OJK dan BI Harus Berkolaborasi dengan Pemda

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah meminta agar program strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang didukung oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dilaksanakan secara tepat sasaran sebagai upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, ia meminta OJK, BI, dan Himbara menjalin komunikasi yang intensif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Kemudian saya meminta kepada masing-masing pihak agar bekerja secara profesional di semua lini, mengingat di Mandalika pada tahun 2022 akan digelar sejumlah *event* tingkat nasional dan internasional. Tentu ini perlu mendapat perhatian khusus terutama para UMKM kita agar bisa mendapatkan suntikan dana,” ujar Wartiah saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI memantau realisasi program strategis BI dan OJK di Mataram, NTB, Jumat (3/12).

Menurut legislator dapil NTB III ini, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB ini terus meningkat, walaupun masyarakat masih mengeluh soal penjaminan mendapatkan program KUR. “Mungkin ke depan kita perlu memiliki ruang khusus yang memungkinkan mendapatkan kemudahan bagi para UMKM yang masih terkendala dalam syarat penjaminan. Saya yakin, seperti yang dilaporkan, OJK, BI dan Himbara memiliki

perhatian yang luar biasa kepada UMKM kita,” imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan, dari hasil pemantauan terkait realisasi program strategis untuk pemulihan ekonomi di NTB cukup baik, ada optimisme pertumbuhan khususnya di bidang sektor jasa keuangan. Artinya, walaupun terjadi pandemi sempat ada tren penurunan pertumbuhan ekonomi, namun tidak terlalu signifikan. Bahkan di antara mereka ada yang cukup eksis mempertahankan pertumbuhan.

“Dari segi konseptual, saya kira langkah-langkah yang sudah disepakati oleh BI, OJK dan DPR sudah bagus, hanya tinggal sejauh mana aplikasi dari rencana itu di lapangan. Jangan hanya di atas kertas itu baik, tapi dalam tataran operasional tidak bisa diwujudkan. Itu yang menjadi perhatian besar kami,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. ■ jk/sf

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah. Foto: Jaka/nvl



Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said bertukar cenderamata dengan Gubernur Aceh, disaksikan para bupati/wali kota se-Aceh. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan karena sangat berkontribusi terhadap pembangunan di Aceh ke depannya.

Hal ini disampaikan usai berdiskusi dengan Gubernur Aceh dan para bupati/wali kota se-Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (2/12). “Dana Otsus Aceh telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Aceh layak untuk diteruskan,” tegas Muhidin.

Politisi Partai Golkar tersebut berharap agar Pemda Aceh mempersiapkan laporan dan evaluasi

Otsus dengan baik. “Pemprov Aceh harus bisa meyakinkan bahwa pemanfaatan Dana Otsus benar benar memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” jelas Muhidin.

Pada kesempatan yang sama Anggota Banggar DPR RI dari dapil Aceh HM. Salim Fakhry dan Nasir Jamil berkomitmen untuk mengusulkan kepada DPR RI agar segera memulai pembahasan mengenai Dana Otsus, sehingga kesinambungan pembangunan yang menggunakan Dana Otsus bisa terus berlanjut. “Kami percaya pemerintah arief dan bijaksana dalam memandang keberlanjutan Dana Otsus bagi Aceh,” ujar Salim.

Senada dengan usulan tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah

menyatakan akan mempersiapkan laporan yang terkait dengan penggunaan Dana Otsus selama ini, termasuk juga hasil evaluasi pemerintah daerah. “Bahkan kami siap jika pemerintah merubah pola pengalokasian dana yang berbasis proyek,” ungkap Nova.

Terkait dengan Otsus, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan agar pemerintah daerah segera mengajukan usulan perpanjangan Dana Otsus. “Kami berharap Pemerintah Aceh bisa meyakinkan dan menunjukkan kinerja pengelolaan Dana Otsus lebih baik, sehingga bisa membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkap Astera. ■ eko/es



BKSAP: Diplomasi Membangun Jembatan untuk Kemajuan Pendidikan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan kegiatan BKSAP Day yang bertemakan “Optimalisasi Peran Parlemen dalam Diplomasi *Soft Power* melalui Dunia Pendidikan” di Universitas Pamulang (Unpam), Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (3/12).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa tujuan BKSAP Day hendak mendekatkan DPR RI dengan kampus, khususnya topik yang secara umum dibahas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terkait mencapai 17 poin

yang ada di dalam SDGs.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, selain memperkuat sinergi parlemen dan kalangan akademis, tujuan kegiatan ini juga untuk mendorong gagasan-gagasan brilian dalam konteks penguatan diplomasi total Indonesia, khususnya dengan diplomasi *soft power* melalui dunia pendidikan.

“Salah satu tugas kita di BKSAP adalah *building the bridge* (membangun jembatan) ekonomi, termasuk pendidikan. Oleh karena itu kami berharap kedatangan ke Unpam ini bukan yang pertama dan yang terakhir namun akan kita tindaklanjuti dengan program-program berikutnya,” ungkap Mardani.

“Ya nanti juga akan kita bantu menyambungkan apa yang diperlukan Unpam dengan universitas-universitas di negara lain. Kita lihat fasilitas di Unpam sudah memadai, dan alangkah indahnya kalau kita bisa membantu menghadirkan *speaker-speaker* terbaik dari beberapa negara untuk berinteraksi dengan teman-teman di Unpam ini,” tegas legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.

Hal senada juga disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, BKSAP menjadi jembatan bagi Unpam untuk bisa menjalin kerja sama dengan universitas-universitas di negara lain, tidak hanya kerja sama dengan kampus-kampus di dalam negeri.

“Kerja sama ini penting agar bisa membuat UNPAM bisa menjadi lebih bagus lagi dari sisi edukasinya, dan fasilitas ke depannya. Kita kan di BKSAP ada lebih dari seratus group kerja sama bilateral dengan parlemen-perlemen negara lain dan ini akan menjadi tugas diplomasi kita salah satunya membuka akses kampus-kampus di luar negeri agar bisa bekerja sama dengan kampus di Indonesia salah satunya Unpam,” ujarnya.

Diplomasi Parlemen yang dilakukan BKSAP saat kunjungan kerja ataupun pada saat menghadiri sidang-sidang internasional diharapkan mampu menjadi konektor dan fasilitator antara potensi pendidikan yang dimiliki kampus nasional dengan kampus internasional. ■ skr/sf



Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI saat mengikuti BKSAP Day di Universitas Pamulang (Unpam). Foto: Singgih/nvi

Setjen DPR Terima Anugerah Meritokrasi dari KASN



Irtama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha menerima Anugerah Meritokrasi dari KASN. Foto: Ist/mvl

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI menerima Anugerah Meritokrasi Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori BAIK. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar.

“Manajemen berbasis sistem itu bekerja tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan guna mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi,” ujar Totok, sapaan akrab Setyanta Nugraha, di sela-sela menghadiri penganugerahan dari KASN

di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12).

Lebih lanjut Totok menerangkan penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam implementasinya mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus menerapkan prinsip-prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit.

Selaras dengan amanat itu, beberapa progres dan perubahan telah dilaksanakan untuk terwujudnya sistem merit di Sekretariat Jenderal DPR-RI yang ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekjen



KAMI BERSYUKUR DENGAN CAPAIAN INI, DAN SEBAGAI PELECUT UNTUK TERUS MENINGKATKAN APA YANG SUDAH DILAKUKAN SELAMA INI

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Setjen DPR-RI di mana setiap jabatan telah memiliki standar kompetensi tertentu.

Selain itu juga telah dilaksanakan *Assesment* untuk memetakan kompetensi dan kualifikasi para ASN di Setjen Jenderal DPR RI. Bahkan telah juga dilakukan Test EPTIGO (English Proficiency Test For Indonesian Government Officials) yaitu uji untuk tes kemampuan bahasa Inggris yang berkaitan dengan tugas sehari-harinya.

“Kami bersyukur dengan capaian ini, dan sebagai pelecut untuk terus meningkatkan apa yang sudah dilakukan selama ini, terutama tata kelola jajaran SDMA dengan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti prosedur, standar, kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan-RB maupun BKN,” ungkap Totok lebih lanjut.

Ia berharap momentum saat ini dapat dijaga dan ditingkatkan terus agar meritokrasi atau sistem merit di Setjen DPR RI betul-betul objektif dan independen sehingga SDM di Setjen DPR RI menjadi SDM yang unggul dan mampu bersaing dengan SDM Parlemen negara lain. ■ ah/sf

BURT DPR Ingatkan Jasindo Tingkatkan Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas RS di Kaltim



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertukar cenderamata dengan BM Jasindo Balikpapan. Foto: Pun/nvl

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengingatkan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk semakin meningkatkan pelayanan kesehatan. Di antaranya seperti fasilitas rumah sakit (RS) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), terutama yang terafiliasi dengan Jasindo. Pasalnya, Kaltim telah ditetapkan sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Demikian disampaikan Agung saat diwawancarai **Parlementaria** usai memimpin tim kunjungan kerja BURT DPR RI dalam rangka meninjau program VVIP Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) dan RS *provider*

dari Jasindo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (6/12).

“Sesuai dengan ketentuan pemerintah, Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara. Tentu, karena nantinya menjadi IKN maka pusat kegiatan negara maka banyak hal perlu dipersiapkan seperti peningkatan fasilitas rumah sakit. Apalagi, DPR pun juga akan pindah kemari, sehingga pelayanan pun harus semakin ditingkatkan,” ujar Agung.

Maka dari itu, politisi Partai Demokrat tersebut mendorong peningkatan sinergitas dan kolaborasi aktif antara Jasindo dengan pihak rumah sakit seperti saling pemberian data *update* terkait data Anggota DPR terkini. Artinya, Jasindo harus aktif

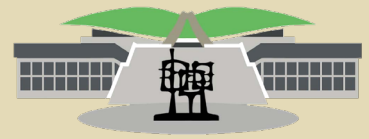
memberikan informasi keanggotaan utamanya yang sudah mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sebaliknya, kata Anggota Komisi III DPR RI itu, RS juga wajib menyampaikan *update* informasi secara berkala. Contohnya, jika ada penambahan fasilitas maka RS juga harus segera *update* kepada Jasindo sehingga Jasindo melalui *Person In Charge* (PIC) dapat lebih cepat memberi arahan rekomendasi RS jika sewaktu-waktu terdapat Anggota Dewan yang sakit atau memerlukan perawatan di RS.

“Tentu, hubungan yang baik yang terjalin antara Jasindo dengan RS ini terus dapat ditingkatkan, sehingga kami sebagai Anggota DPR dan pejabat lainnya yang menikmati fasilitas jaminan kesehatan ini lebih nyaman dan lebih terjamin kesehatannya sehingga tentunya lebih cepat untuk kembali sehat dan beraktivitas,” pungkash Agung. ■ pun/sf

”

**PENINGKATAN
SINERGITAS DAN
KOLABORASI AKTIF
ANTARA JASINDO
DENGAN PIHAK RUMAH
SAKIT SEPERTI SALING
PEMBERIAN DATA
UPDATE TERKAIT DATA
ANGGOTA DPR TERKINI.**



Suasana pengambilan sumpah janji pelantikan dua anggota PAW, yaitu Riyanta dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Partai NasDem dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12). Foto: Jaka/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi pejabat di lingkungan Setjen DPR RI saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12). Foto: Jaka/nvl



Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI saat menerima penghargaan Anugerah JDIHN Award dari Menkumham Yasonna Laoly, di Jakarta, Selasa (2/12). Foto: Ist/nvl